

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.
2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kabupaten Lombok Barat masih banyak bergantung pada pasokan bahan pokok dari luar daerah, seperti Kabupaten tetangga bahkan dari Pulau Bali atau Jawa.

Hal ini menyebabkan :

- Harga bahan pokok sangat rentan terhadap gangguan distribusi (cuaca, infrastruktur, dan biaya transportasi).
- Kenaikan harga bahan bakar langsung berdampak pada harga komoditas

2. Ketergantungan terhadap Musim (Musiman)

- Produksi pangan sangat bergantung pada musim tanam yang belum sepenuhnya dikelola dengan sistem irigasi modern.
- Ketika musim kemarau, produksi menurun, memicu kenaikan harga.

3. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian harga pada Dinas Pertanian terkait komoditas tersebut diatas antara lain :

- a. Bahwa pada musim panen padi saat ini (Januari - Maret) rata-rata GKP Petani dijual dengan harga 6.500/kg sesuai dengan HPP, hal ini mempengaruhi harga beras tetap berada di harga minimal Rp 13.500 s/d Rp 000,- dipasar tradisional
- b. Gagalnya program bantuan cabai kemasyarakatan yang di tanam pada bulan Desember 2024 disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan tanaman cabai dilahan sawah dihanyutkan oleh banjir sekitar 95%.
- c. Kurangnya Pasokan cabe dan bawang merah dari petani baik dari petani dalam Kabupaten dan luar daerah terkendala dengan cuaca ekstrim dan banjir sehingga harga cabai rawit merah dan bawang merah tetap berada di ambang batas atas harga normal.
- d. Dukungan anggaran APBD untuk kegiatan pengembangan komoditi Bawang berkurang terkait budidaya, pasca panen serta dukungan SDM kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
- e. Kurangnya intensitas koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait seperti pengepul, pengusaha dan aparat penegak hukum, ketika harga komoditi melambung tinggi, tindakan pemantauan dan pengawasan dilapangan ditingkatkan namun kurangnya kepedulian Pemerintah Daerah saat harga cabai anjlok (harga tidak menguntungkan petani).

4. Permasalahan utama pengendalian inflasi Daerah diantaranya:

- a. Rendahnya konektivitas jaringan distribusi pangan, permasalahan daerah yang memiliki tingkat ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi.

- b. Kesenjangan informasi dan distorsi struktur pasar, kesenjangan informasi antar pelaku ditengah panjangnya rantai distribusi menyebabkan tidak efisiennya harga dipasar
  - c. Produktivitas pangan yang berkurang / tidak optimal karena adanya kendala iklim yang tidak menentu khususnya di Kabupaten Lombok Barat.
5. Kenaikan harga komoditas perikanan disebabkan karena perubahan cuaca terutama untuk jenis-jenis ikan hasil tangkapan seperti ikan tongkol dan ikan kembung di awal januari-pertengahan Februari) sedangkan untuk perikanan hasil budidaya relatif stabil hal ini disebabkan terjaminnya ketersediaan ikan dan stabilnya harga dan pasokan pakan ikan.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

## **UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2025**

### **1.KETERJANGKAUAN HARGA**

#### **MELAKUKAN OPERASI PASAR/GERAKAN PANGAN MURAH/PASAR TANI**

- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaksanakan Operasi Pasar Murah (OPM)/Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Tani bersinergi dengan Bank Indonesia (BI), Bulog dan OPD terkait secara berkala.
- Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pakan sebagai penyebab utama kenaikan harga ikan khususnya ikan budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat tetap melakukan pemantauan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan di masing-masing wilayah.Selain itu untuk ketersediaan komoditas ikan pemantauan dilakukan di Cold Storage yang ada di Dusun Ireng Desa Jati Sela Kecamatan Gunung Sari dan sentra pemindangan di Kecamatan Batulayar.
- Untuk kegiatan survey hargapasar dilakukan setiap hari oleh Disperindag, Dikpangan dan Diperta Kab. Lobar pada pada Pasar Kediri dan Pasar Gerung. Melaporkan pergerakan harga komoditas rutin melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) untuk memonitor Perkembangan Harga secara harian. Data atas laporan indeks perkembangan harga (IPH) yang digunakan sebagai laporan Ke Kemendagri adalah data yang diperoleh dari Disperindag Kab.Lobar yang kemudian akan di laporkan ke Itjen Kemendagri oleh Inspektorat. Data terkait indeks perkembangan harga (IPH) Kabupaten Lombok Barat dapat diakses melalui <http://s.bps.go.id/iphlobar>. Dan untuk update harga Kabupaten Lombok Barat dapat diakses melalui <http://s.bps.go.id/updatepasarlobar>. Selain itu dapat juga diakses melalui <https://silakniki.lombokbaratkab.go.id/>

#### **JADWAL PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH (OPM) DAN GERAKAN PANGAN MURAH (GPM) BULAN JANUARI S/D MARET 2025**

<b>NO</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>TANGGAL KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Dusun Batumulik Desa Gapuk	Gerung	21 Februari 2025	PAD

2.	Desa Gelogor	Kediri	24 Februari 2025	PAD
3.	Desa Tempos	Gerung	26 Februari 2025	PAD
4.	Kantor Camat Kediri dan Halaman Kantor Dinas Pertanian	Kediri dan Labuapi	12 Maret 2025	PAD
5.	Kantor Desa Gontoran	Lingsar	13 Maret 2025	BI
6.	Kantor Desa Dasan Baru	Gerung	18 Maret 2025	PAD
7.	Kantor Desa Kediri Induk	Gerung	19 Maret 2025	BI
8.	Polres Lombok Barat	Lembar	20 Maret 2025	Polres
9.	Polda Mataram	Mataram	21 Maret 2025	Polda
10.	Taman Kota Giri Menang	Labuapi	25 Maret 2025	BI

## 2. KETERSEDIAAN PASOKAN

### MELAKSANAKAN SIDAK PASAR DAN SIDAK GUDANG DISTRIBUTOR

- Melaksanakan pemantauan harga bahan pokok di pasar-pasar induk setiap hari kerja dan gudang-gudang penyedia stok komoditas tertentu, seperti beras, minyak goreng, gula dan LPG dan melakukan Pengawasan/Sidak Gudang Alfamart, Gudang Jembatan Baru, Pasar, dan SPBE Lombok Menara Energy Gas dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Hari Raya Idul Fitri 1446H guna mengecek ketersediaan pasokan jelang hari raya.

### JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SIDAK PASAR DAN SIDAK GUDANG DISTRIBUTOR BULAN JANUARI S/D MARET 2025

NO	TANGGAL SIDAK	LOKASI SIDAK	KECAMATAN	KETERANGAN
1	11 Februari 2025	Pasar Gerung SPBU Gerung SPBE Lombok Menara Energygas	Gerung	Sidak/ Pengawasan
2	14 Februari 2025	Pasar Kediri Gudang Jembatan Baru	Kediri	Sidak / Pengawasan
3	28 Februari 2025	Pasar Kediri Gudang Alfamart	Kediri Dasan Cermen	Sidak / Pengawasan
4	07 Maret 2025	Pasar Gerung	Gerung	Sidak / Pengawasan

### OPERASI PASAR PENYALURAN BERAS SPHP

Bulog melaksanakan kerjasama dengan pedagang selaku mitra bulog untuk menyalurkan beras SPHP di 4 Pasar kecamatan dan Pasar Gerung menjadi salah satu acuan untuk melaksanakan Operasi Pasar khusus untuk penyaluran beras SPHP dengan melibatkan Pimpinan beserta Kepala OPD yang tergabung dalam Tim TPID Tingkat Kab. Lobar. Pendropan Beras SPHP dilaksanakan 2 kali dalam satu minggu yaitu setiap hari senin dan kamis dengan jumlah 1,5 - 2 ton per satu kali droping untuk tiap mitra bulog.

## **BANTUAN BENIH PADI GAMAGORA**

Benih Gamagora 7 merupakan bantuan langsung ke pada petani yang diberikan oleh Pemkab. Lombok Barat melalui Dinas Pertanian berkolaborasi/bersinergi dengan Bank Indonesia Cabang NTB. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersinergi dengan Bank Indonesia akan melakukan uji coba penanaman benih Gamagora 7. Uji coba varietas ini mendukung program Pemerintah Pusat menuju swasembada pangan tahun 2025. Pemda dan BI menyerahkan bibit padi jenis Gamagora 7 bersertifikat kepada 18 kelompok tani dari 16 desa berada di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat seluas 24 Bantuan yang diberikan berupa benih padi, Pupuk dan Alsintan untuk meningkatkan hasil produksi padi sebesar 11 sampai dengan 12 ton Gabah Kering Panen meningkat 100% dari hasil produksi pada umumnya. Program ini dalam rangka menjaga ketersediaan stock dalam rangka pengendalian inflasi sehingga stock beras tetap tersedia. Andi Wahyu R ( Deputi Kepala Perwakilan NTB ) mengatakan ada 18 kelompok tani menerima bantuan program pengendalian inflasi untuk menjaga ketersediaan stock beras diberikan 485 kg bibit gamagora 7 di Kabupaten Lombok Barat. Untuk hasil yang maksimal harus didukung dengan GAP yang tepat. Program ini juga untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan. Kedepan harapan Bank Indonesia tetap bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam rangka pengendalian inflasi. Bibit Gamagora 7 yang diserahkan ini merupakan hasil riset dan kajian oleh anak bangsa dari UGM telah di uji coba dan hasilnya sangat maksimal itupun dilahan yang tidak begitu banyak air. PJ Bupati juga berharap Lobar bisa menuju swasembada pangan dikarenakan wilayah Lombok Barat telah memiliki tanah yang subur dan produktif kemudian didukung oleh SDM yang terlatih begitu juga dengan anggaran Pemda yang cukup untuk menuju swasembada Nasional. Benih padi Gamagora 7 akan diuji coba tanam di lahan yang banyak airnya semoga akan lebih maksimal hasilnya. Dari Analisanya bibit Gamagora 7 menghasilkan 11 ton GKP pada 1 hektar sawah lahan kering. Pemkab Lobar berharap penerimaan bibit padi ini menjadi awal yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan bagi generasi mendatang. Kerjasama ini diharapkan dapat terus dilanjutkan sebagai upaya untuk bersama-sama menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung Program Presiden dalam mengupayakan swasembada Pangan Nasional dan mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

## **GERAKAN TANAM JAGUNG**

Gerakan tanam jagung dilahan kering dan dibawah tegakan bersinergi dengan POLRI.

Gerakan tanam jagung dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, di Kabupaten Lombok Barat berlokasi di 2 (dua) tempat yaitu:

1. Desa Selat Kecamatan Narmada bersinergi dengan Polres Mataram seluas 2 ha dibawah tegakan pohon kelapa didalam lahan kebun Perbenihan Tanaman Perkebunan Diperta Lobar, dan
2. Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong sebanyak 2 Hektar berada di lahan Kelompok Tani yang lahannya pun memanfaatkan lahan perkebunan/ dibawah tegakan pohon kelapa.

## **SERGAP BULOG**

Sergap bulog adalah serapan gabah petani oleh bulog sebagai salah satu upaya untuk menjaga ketahanan pangan Nasional khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Bulog di haruskan membeli Gabah Kering Panen di petani langsung dengan harga Rp. 6.500,-/kg dengan any Quality. Produktivitas padi di Lombok Barat rata-rata meningkat pada panen raya di bulan maret tahun ini. Peningkatan Produksi padi rata- rata 2 ton/hektar. Produktivitas padi rata-rata tahun lalu (2024) hanya 5,4 ton/ hektar dan tahun ini naik menjadi rata-rata 6,7 – 7,9 ton/hektar. Peningkatan produktivitas padi pada panen raya tahun ini membuat stock pangan di Lombok barat untuk beberapa bulan kedepan mengalami surplus. Kelebihan padi mencapai 20-25 ribu ton dan diperkirakan akan terus meningkat pada panen bulan-bulan berikutnya karena bantuan benih gamgora 7 diperkirakan mulai panen di bulan Mei yang hasilnya di perediksi mencapai 11-12 ton/hektar.

## **GERAKAN TANAM CABAI**

Dalam Rangka Menekan Laju Inflasi Kabupaten Lombok Barat Maka Pemerintah Daerah Dalam Hal Ini Melalui Dinas Pertanian Melakukan Berbagai Upaya Antara Lain :

1. Bantuan Tanaman Cabai Dalam Polybag Kepada Kelompok Wanita Tani Bantuan tanaman cabe dalam polybag desember tahun 2024 sebanyak 000 polybag kepada 48 KWT, sembilan puluh lima persen (95%) rusak dan mati karena serangan OPT akibat intensitas hujan yang tinggi dan juga di beberapa tempat hanyut karena banjir.
2. Bantuan Bibit Cabai Dan Tomat Serta Mulsa Kepada Kelompok Tani Sentra Tembakau Bantuan Bibit Cabe dan tomat di dua kecamatan untuk kelompok tani sentra tembakau (Kediri dan Lembar) pada tahun 2024 yang ditanam mulai bulan nopember dan desember dan berproduksi di tahun 2025. Untuk cabe yang di kelompok tani Beriuk Pacu II Desa Ombe(30 are) dan di kelompok tani Tibu Lingkung Desa Jakem Timur (25 are) terkena banjir karena intensitas hujan yang tinggi sehingga mati semua.
3. Bantuan Bibit Cabai Kepada Semua Opd Dan Camat Di Kabupaten Lombok Barat Dan;
4. Gerakan Tanam Cabai Dengan Memanfaatkan Lahan-Lahan Yang Belum Termanfaatkan Secara Optimal Seperti Lahan Dibawah Tegakan Atau Lahan Kering. Melaksanakan gerakan menanam cabai yang dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 16 Januari 2025 yang dihadiri oleh Bupati Lombok Barat, Kepala OPD dan Camat sekabupaten Lombok Barat, Forkopinda Kabupaten dan Kecamatan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta perwakilan beberapa kelompok tani, kelompok wanita tani dan anggota masyarakat lainnya yang berlokasi di Lahan UPT Perbenihan Tanaman Perkebunan (Kebun Kelapa Dinas Pertanian) di Desa Selat. Gerakan menanam cabai ini dengan memanfaatkan lahan-lahan yang belum termanfaatkan secara optimal seperti lahan dibawah tegakan (lahan kebun) atau lahan kering. Diharapkan gerakan tanam cabai yang dihadiri oleh semua unsur perangkat daerah sekabupaten Lombok Barat dan kelompok tani, kelompok wanita tani serta masyarakat bisa menjadi pengungkit/motor penggerak bagi semua ASN Lombok Barat dan semua masyarakat untuk mau bertanam cabai terutama di lahan-lahan tidur/tidak termanfaatkan dan lahan pekarangan. Gerakan tanam cabai yang dilaksanakan di lahan UPT Perbenihan Tanaman Perkebunan seluas lebih kurang 1(satu) hektar dan dikelola oleh UPT Balai Benih Utama (BBU).

## **3. KELANCARAN DISTRIBUSI**

### **1. Pengaturan dan prioritas kendaraan pengangkutan bahan kebutuhan pokok pada**

### **saat -saat tertentu**

Dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri 1446 H, Dinas Perhubungan melaksanakan tugas pengamanan Operasi Ketupat Rinjani Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 26 Maret s/d 7 April 2025. Adapun lokasi pengamanan adalah sebagai berikut :

- Pos Pengamanan Batulayar (Sasaku), dengan jumlah personil yang bertugas sebanyak 8 orang dan 1 orang penanggungjawab
- Pos Pengamanan GMS, dengan jumlah personil yang bertugas sebanyak 9 orang dan 1 orang penanggungjawab
- Pos Pengamanan Lembar, dengan jumlah personil yang bertugas sebanyak 8 orang dan 1 orang penanggungjawab
- Pos Pengamanan Narmada, dengan jumlah personil yang bertugas sebanyak 8 orang dan 1 orang penanggungjawab

## **2. Pengaturan dan pengawasan kendaraan angkutan barang**

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari, mulai dari Januari s/d Maret 2025, adapun personil yang dilibatkan diganti setiap bulannya. Setiap bulannya, jumlah personil yang dilibatkan sebanyak 9 orang dengan lokasi kegiatan pada Tempat Parkir Khusus Segenter. Penertiban ini bertujuan untuk memberikan ruang parkir bagi kendaraan barang yang notabene adalah kendaraan besar agar tidak melakukan parkir di bahu jalan. Adapun kendaraan yang parkir sebagian besar adalah kendaraan yang akan menuju Pelabuhan Lembar maupun pelabuhan Gili Mas dengan tarif yang sangat terjangkau. Ketersediaan ruang parkir ini cukup penting dalam rangka memperlancar arus lalu lintas terlebih pada ruas jalan utama menuju Pelabuhan. Dengan lancarnya arus lalu lintas, maka arus distribusi barang, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder menjadi lancar juga, tiba tepat waktu dan mengurangi biaya distribusi. Setiap harinya, personil mencatat/mendata kendaraan yang melakukan parkir di Segenter. Adapun jumlah kendaraan angkutan barang yang parkir pada Tempat Parkir Khusus Segenter dari bulan Januari s/d Maret adalah sebanyak 1170 unit.

## **3. Pengujian Laik Jalan Kendaraan**

Adapun aktifitas yang dilaksanakan antara lain:

- Pelaksanaan uji berkala pada kendaraan angkutan orang dan barang
- Pemberian rekomendasi laik jalan bagi kendaraan yang memenuhi syarat keamanan dan keselamatan
- Pengawasan angkutan orang dan barang yang tidak laik jalan

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan setiap hari Senin s/d Sabtu di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Dampak yang ditimbulkan terhadap pengendalian inflasi adalah Memastikan kendaraan angkutan orang dan barang yang beroperasi sudah laik jalan, sehingga resiko kecelakaan lalu lintas yang mengancam distribusi barang dapat dikurangi.

## **4. Pengawasan lalu lintas dan penertiban areal terminal**

Lokasi Pelaksanaan penertiban terminal adalah pada sejumlah terminal di wilayah Kabupaten Lombok Barat, diantaranya :

- Shelter Narmada
- Shelter Gunungsari
- Shelter Keru
- Shelter Kediri

Adapun aktifitas yang dilaksanakan adalah :

- Penertiban areal terminal untuk kelancaran arus keluar masuk kendaraan angkutan penumpang dan barang menuju terminal dan pasar
- Pengawasan kelancaran lalu lintas pada seluruh terminal, terlebih pada hari pasaran maupun menjelang Hari Raya

#### **4.KOMUNIKASI EFEKTIF**

- **RAPAT KOORDINASI/HIGH LEVEL MEETING (HLM)TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH (TPID)**
- Melaksanakan rapat koordinasi TPID Kabupaten Lombok Barat Bersama dengan stakeholder terkait, setiap minggu dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
- Sinergi pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan forkompimda Kabupaten Lombok Barat.

#### **4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.**

- Keterbatasan Anggaran bersumber APBD dalam pelaksanaan pengendalian Inflasi, terutama terhadap program subsidi transportasi untuk mendukung kegiatan distribusi dalam pelaksanaan operasi pasar/Gerakan pangan/Pasar tani.
  - Masih terdapat kendala dalam pemeliharaan jaringan terhadap pengembangan Web Silakniki (sistem pelaporan harga terkini) untuk memberikan informasi terkait harga dan kegiatan dalam pengendalian inflasi serta melakukan bimtek kepada tenaga operator web silakniki.
  - Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan.
  - Kebutuhan akan inovasi dalam mendukung ketersediaan pangan sepanjang tahun dan kelancaran distribusi serta indikasi surplus devisit pangan di masing-masing daerah.
  - Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi daerah untuk tahun anggaran 2025 berupa pemberian subsidi transportasi pada saat pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah.
  - Terkait penyaluran BLT DD sampai dengan bulan Maret 2025baru 71 desa dari 119 desa yang telah menyalurkan BLT DD untuk bulan Januari s/d Maret 2025 sedangkan sisanya masih sedang berproses di administrasi keuangan. Untuk itu pihak Dinas PMD tetap melakukan pemantauan dan tetap berupaya agar BLT DD dapat tersalur tepat waktu. Sedangkan untuk program ketahanan pangan sampai dengan bulan Maret masih belum ada pemerintah desa yang melakukan eksekusi, hal ini disebabkan karena untuk program ketahanan pangan ada kaitannya dengan proses perencanaan dan rembug kelompok masyarakat.
  - Dari hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, ditemukan berbagai permasalahan sebagai berikut :
1. Belum adanya portal pembatas pada areal parkir Kediri untuk menertibkan kendaraan
    -

- yang melakukan turun naik penumpang
2. Belum tersedianya areal parkir khusus ojek untuk mencegah masuknya ojek hingga ke dalam pasar
  3. Belum adanya personil PPNS yang memadai untuk melakukan penindakan/penertiban dalam kegiatan pengawasan kendaraan laik jalan
  4. Belum adanya fasilitas yang memadai di Tempat Parkir Khusus Segenter bagi pengemudi yang melakukan parkir kendaraan

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Agar inflasi dapat terjaga berada pada kisaran angka sesuai target Nasional, sehingga dapat menjamin dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan terus melakukan pengecekan harga harian di pasar tradisional dan terus melaporkan hasil harga pasar kepada Pemerintah Pusat melalui SP2KP.
- Agar Tim TPID semakin solid melakukan upaya pengendalian inflasi di daerah dengan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti melakukan kegiatan operasi pasar, sidak pasar, Gerakan menanam, serta penggunaan dana BTT dalam pengendalian inflasi di daerah
- Agar pemanfaatan aplikasi digital seperti QRIS dan sejenisnya semakin dikembangkan sehingga dapat membantu Pemasaran produk UMKM melalui Aplikasi dan QR Code E-LAPAK SITEBEL dan QR Code E-LAPAK SITEBEL diharapkan dapat merambah hingga ke Hotel-Hotel yang berada di Lombok Barat.
- Dukungan dan perhatian Pemerintah Pusat terhadap pengendalian inflasi daerah semakin meningkat melalui pengalokasian dana, sarana dan prasarana dalam pengendalian Inflasi.
- Untuk menjaga kestabilan harga di sektor kelautan dan perikanan upaya yang dilakukan antara lain : Bantuan Bibit dan Pakan, Bantuan peralatan penangkapan, Fasilitasi pembangunan pakan mandiri, dan fasilitasi pembangunan unit pengolahan ikan. Memaksimalkan pemanfaatan gudang penyimpanan (cold storage) yang dapat memperpanjang masa penyimpanan produk perikanan sehingga gejolak harga dapat dikendalikan
- Intervensi pemerintah juga dibutuhkan dalam hal penyediaan anggaran untuk mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi seperti operasi pasar murah. Subsidi harga pada saat terjadi kenaikan harga ikan.
- Memaksimalkan pemanfaatan gudang penyimpanan (cold storage) yang dapat memperpanjang masa penyimpanan produk perikanan sehingga gejolak harga dapat dikendalikan.
- Mengupayakan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dapat tersalurkan tepat waktu agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
- Mengupayakan agar Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes) serta program Tanaman Pangan Lestari berjalan sesuai dengan rencana berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan memanfaatkan Dana Desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa di 119 desa se kabupaten Lombok Barat sesuai dengan road map.
- Memfasilitasi Masyarakat Desa agar memanfaatkan pekarangan rumah melalui program Pengembangan Desa Wisata Sayur dapat segera terealisasi dengan memanfaatkan dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa yang berkoordinasi dengan dinas



instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.

◦ Rekomendasi kebijakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat :

1. Meningkatkan efisiensi produksi pertanian dengan memperbaiki infrastruktur pertanian, meningkatkan akses ke teknologi pertanian yang modern, dan memberikan pelatihan yang berkualitas kepada
  2. Meningkatkan produktivitas pertanian dengan menggalakkan penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan, serta mengoptimalkan pengelolaan air dan lahan pertanian.
  3. Mendorong diversifikasi usaha pertanian dengan memberikan pelatihan kepada petani untuk mengembangkan komoditas pertanian yang beragam, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada satu komoditas saja.
  4. Memperkuat pasar pertanian dengan meningkatkan akses petani ke pasar yang lebih luas, memperbaiki infrastruktur pasaran, serta mengimplementasikan regulasi yang memungkinkan terciptanya pasar yang sehat dan berdaya saing.
  5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas stok pangan dengan mengoptimalkan regulasi impor dan ekspor, serta mendorong keberlangsungan kegiatan riset dan pengembangan pertanian.
  6. Mengkampanyekan pola konsumsi pangan yang sehat dan berkelanjutan, untuk mengurangi tekanan permintaan terhadap pangan dan mereduksi inflasi.
  7. Mendukung pembentukan koperasi pertanian, untuk membantu petani dalam memperoleh harga yang adil dan mengurangi biaya
- Rekomendasi kebijakan pada DPMD Kab. Lombok Barat

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menekan laju inflasi terutama di desa antara lain :

1. Mengupayakan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dapat tersalurkan tepat waktu agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
2. Mengupayakan agar Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes) serta program Tanaman Pangan Lestari berjalan sesuai dengan rencana berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan memanfaatkan Dana Desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa di 119 desa se kabupaten Lombok Barat.
3. Mengupayakan agar program Pengembangan Desa Wisata Sayur dapat segera terrealisasi dengan memanfaatkan dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa yang berkoordinasi dengan dinas instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.

◦ Rekomendasi kebijakan padapada Dinas perhubungan Kab. Lombok Barat :

1. Perbaiki Fasilitas Pendukung di setiap tempat parkir, terminal dan Pelabuhan Pengumpan

Ketersediaan terminal maupun pelabuhan cukup penting dalam kelancaran transportasi. Untuk itu fasilitas pendukung terus ditingkatkan pada terminal di Kabupaten Lombok Barat, khususnya tempat parkir khusus angkutan barang. Pendistribusian komoditas yang efisien akan menurunkan harga jual dan dapat menekan angka inflasi. Selain didukung dengan fasilitas pendukung, hal yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan yang lebih intensif oleh personil Dinas Perhubungan yang dilakukan di sejumlah terminal, baik pengawasan dalam penertiban parkir kendaraan maupun kegiatan bongkar muat.

2. Evaluasi jumlah jaringan trayek menuju pusat perekonomian.

Hingga saat ini, jumlah jaringan trayek di Kabupaten Lombok Barat adalah 31 jaringan. Dalam hal jaringan trayek yang menghubungkan pusat perekonomian, dari keseluruhan jaringan tersebut, hanya 75% jaringan yang tergolong aktif, 25% diantaranya masih non aktif. Artinya belum ada angkutan/moda transportasi yang beroperasi dalam trayek tersebut. Kebijakan ke depannya adalah mengaktifkan kembali koperasi angkutan khususnya pada jaringan non aktif, sehingga jumlah angkutan pedesaan mencukupi kebutuhan masyarakat dari dan menuju pusat perekonomian. Hal ini mendukung pemerintah secara tidak langsung dalam mengoptimalkan distribusi komoditas pangan utama kepada masyarakat sehingga dapat menekan angka inflasi.

3. Penyediaan prasarana dan perlengkapan jalan di sepanjang jalur strategis menuju pusat perekonomian. Kondisi jalan yang mantap dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan memberikan dampak tidak langsung berupa kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pengemudi angkutan kendaraan barang maupun pelaku ekonomi lainnya yang berkegiatan di pasar. Mengurangi dampak kecelakaan lalu lintas sehingga distribusi berbagai komoditi utama pangan juga lancar.